



## Analisis Kebijakan Pendidikan Sosial Kementerian Sosial di Kabupaten Sukabumi Studi Kasus Sekolah Rakyat Phala Martha

Teguh Hariyanto<sup>1</sup>, Tamlekha<sup>2</sup>, Dede Ropi Fahmi<sup>3</sup>, Sunan Hanif Ihsan Assalaam<sup>4</sup>, Ara Hidayat<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: [hariyantoteguh276@gmail.com](mailto:hariyantoteguh276@gmail.com), [tamlekhayuni97@gmail.com](mailto:tamlekhayuni97@gmail.com), [ropifahmi1307@gmail.com](mailto:ropifahmi1307@gmail.com), [hanifihsan98@gmail.com](mailto:hanifihsan98@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-12-08 Revised: 2026-01-15 Published: 2026-02-03  <b>Keywords:</b> <i>Social Education Policy; Ministry Of Social Affairs; Sekolah Rakyat; Social Rehabilitation; Non-Formal Education.</i>	Social education is one of the strategic instruments in efforts to alleviate poverty and empower vulnerable groups. Unlike formal education, which is administered under the Ministry of Education, social education in Indonesia is organized by the Ministry of Social Affairs as part of social welfare and rehabilitation services. This study aims to analyze the implementation of social education policies of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia in Sukabumi Regency through a case study of Sekolah Rakyat Phala Martha. The research employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman data analysis model. The findings indicate that Sekolah Rakyat Phala Martha represents an inclusive and rehabilitative implementation of social education policy by integrating skills training, psychosocial assistance, and character education. The program has been shown to have a positive impact on improving learners' independence, self-confidence, and social participation. Nevertheless, the implementation of the program still faces challenges related to limited human resources, funding constraints, and community participation. This study recommends strengthening cross-sector collaboration, innovating social education curricula, and establishing sustainable monitoring and evaluation systems to enhance the effectiveness of social education policies at the regional level.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-12-08 Direvisi: 2026-01-15 Dipublikasi: 2026-02-03  <b>Kata kunci:</b> <i>Kebijakan Pendidikan Sosial; Kementerian Sosial; Sekolah Rakyat; Rehabilitasi Sosial; Pendidikan Nonformal.</i>	Pendidikan sosial merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok rentan. Berbeda dengan pendidikan formal yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, pendidikan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari layanan rehabilitasi dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Sukabumi melalui studi kasus Sekolah Rakyat Phala Martha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat Phala Martha merupakan bentuk implementasi kebijakan pendidikan sosial yang bersifat inklusif dan rehabilitatif, dengan mengintegrasikan pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, dan pendidikan karakter. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian, kepercayaan diri, dan partisipasi sosial peserta didik. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi lintas sektor, inovasi kurikulum sosial, serta sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan sosial di tingkat daerah.

### I. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Dalam perspektif pembangunan nasional, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang berdaya

saing, berkarakter, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Konstitusi Indonesia secara tegas menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menjamin

terselenggaranya pendidikan yang layak dan merata bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Melalui pendidikan, individu diharapkan memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai sosial yang menjadi bekal utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kelompok rentan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam mengakses pendidikan formal. Masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, anak dari keluarga bermasalah sosial, serta individu yang mengalami disfungsi sosial sering kali berada di luar jangkauan sistem pendidikan formal. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan geografis, stigma sosial, rendahnya dukungan keluarga, serta minimnya layanan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan khusus mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita konstitusional dan realitas implementasi kebijakan pendidikan di lapangan.

Ketimpangan akses pendidikan tersebut berimplikasi langsung terhadap munculnya persoalan struktural yang lebih luas, terutama dalam bentuk reproduksi kemiskinan dan keterbelakangan sosial. Individu yang tidak memperoleh pendidikan memadai cenderung memiliki keterbatasan keterampilan, akses kerja yang sempit, serta tingkat pendapatan yang rendah. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru gagal berfungsi optimal bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, upaya pemerataan pendidikan tidak dapat hanya bergantung pada sistem pendidikan formal semata, melainkan memerlukan pendekatan alternatif yang lebih fleksibel, inklusif, dan kontekstual.

Dalam konteks tersebut, pendidikan nonformal dan pendidikan sosial hadir sebagai alternatif strategis untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal. Pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang lebih lentur, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Sementara itu, pendidikan sosial secara khusus dirancang untuk merespons persoalan sosial yang dialami individu atau kelompok tertentu, seperti keterlantaran, kemiskinan, disabilitas, dan disfungsi sosial. Pendidikan sosial tidak

hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran akademik atau keterampilan teknis, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan dan rehabilitasi sosial yang berorientasi pada pemulihan martabat manusia, penguatan kapasitas individu, serta peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi.

Pendidikan sosial menempatkan peserta didik sebagai subjek yang memiliki potensi, bukan sekadar objek bantuan. Melalui pendekatan yang humanistik dan partisipatif, pendidikan sosial berupaya membangun kepercayaan diri, kesadaran sosial, dan kemampuan adaptasi individu terhadap lingkungan sosialnya. Dengan demikian, pendidikan sosial tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Pendidikan menjadi bagian integral dari proses rehabilitasi sosial yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial individu agar mampu hidup secara layak dan mandiri di tengah masyarakat.

Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki mandat konstitusional dan yuridis untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Dalam kerangka tersebut, pendidikan sosial dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, khususnya bagi kelompok rentan yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan dasar, termasuk pendidikan formal.

Sebagai tindak lanjut dari mandat tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan berbagai program rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kebijakan ini dipertegas melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial. Peraturan ini menekankan pendekatan holistik, partisipatif, dan berorientasi pada kemandirian dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Pendekatan holistik berarti bahwa layanan tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup dimensi pendidikan, psikososial, keterampilan kerja, dan penguatan jejaring sosial. Pendekatan partisipatif menempatkan penerima manfaat sebagai aktor aktif dalam proses rehabilitasi, sedangkan orientasi pada kemandirian menekankan keberlanjutan hasil program setelah intervensi berakhir.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah program Sekolah Rakyat yang diselenggarakan di berbagai sentra rehabilitasi sosial Kementerian Sosial. Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pendidikan sosial berbasis nonformal yang menyasar kelompok rentan dan terpinggirkan. Program ini mengintegrasikan pendidikan dasar, pendidikan karakter, pelatihan keterampilan, serta pendampingan psikososial dalam satu kesatuan layanan. Dengan model tersebut, Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas kognitif peserta didik, tetapi juga membangun kemandirian, etos kerja, dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan sosial.

Sekolah Rakyat Phala Martha di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu contoh konkret implementasi kebijakan pendidikan sosial Kementerian Sosial di tingkat lokal. Sentra Phala Martha memiliki peran strategis sebagai lembaga rehabilitasi sosial yang melayani berbagai kelompok rentan. Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kompleksitas persoalan sosial yang cukup tinggi, termasuk tingkat kemiskinan, pengangguran, serta angka putus sekolah yang relatif signifikan di beberapa wilayah. Kondisi geografis yang luas dan heterogen turut memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan formal, sehingga pendidikan sosial menjadi alternatif penting bagi kelompok yang terpinggirkan.

Dalam praktiknya, Sekolah Rakyat Phala Martha menyelenggarakan pendidikan dengan pendekatan kontekstual yang disesuaikan dengan latar belakang sosial peserta didik. Kurikulum yang diterapkan tidak sepenuhnya mengikuti kurikulum formal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta. Pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai sosial, serta pelatihan keterampilan praktis menjadi bagian penting dari proses pembelajaran. Selain itu, pendampingan psikososial diberikan untuk membantu peserta didik mengatasi trauma, rendahnya kepercayaan diri, dan hambatan psikologis lainnya yang kerap dialami oleh kelompok rentan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pendidikan sosial di tingkat lokal tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta dukungan masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas program. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat masih memerlukan penguatan agar program pendidikan sosial dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi kebijakan pendidikan sosial menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan.

Penelitian ini menjadi relevan dan signifikan dalam konteks pengembangan kebijakan pendidikan sosial di Indonesia. Kajian empiris mengenai implementasi kebijakan pendidikan sosial Kementerian Sosial di tingkat lokal masih relatif terbatas, khususnya yang menyoroti integrasi antara pendidikan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui studi kasus Sekolah Rakyat Phala Martha di Kabupaten Sukabumi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam praktik pendidikan sosial di lapangan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memahami proses implementasi kebijakan pendidikan sosial di bawah Kementerian Sosial, menganalisis model pendidikan sosial dan rehabilitasi yang diterapkan, serta mengkaji dampak sosial yang dihasilkan bagi peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kebijakan pendidikan sosial, serta kontribusi praktis bagi perbaikan program pendidikan sosial di masa mendatang. Dengan demikian, pendidikan sosial dapat semakin berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pendidikan sosial, termasuk dinamika pelaksanaan program, interaksi antaraktor, serta makna yang dibangun oleh para pelaksana dan peserta didik dalam konteks pendidikan sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial secara holistik dan kontekstual, sehingga kebijakan pendidikan sosial tidak hanya dipahami sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Metode studi kasus digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada satu unit analisis tertentu, yaitu Sekolah Rakyat Phala Martha sebagai bagian dari Sentra Phala Martha Kementerian Sosial Republik Indonesia. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan

eksplorasi mendalam terhadap fenomena kebijakan pendidikan sosial dalam konteks nyata, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang melingkupinya. Dengan metode ini, Sekolah Rakyat Phala Martha diposisikan sebagai kasus representatif untuk memahami implementasi kebijakan pendidikan sosial Kementerian Sosial di tingkat daerah.

Lokasi penelitian berada di Sentra Phala Martha Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain keberadaan Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan sosial berbasis rehabilitasi, karakteristik peserta didik yang berasal dari kelompok rentan, serta kompleksitas permasalahan sosial di wilayah Kabupaten Sukabumi. Selain itu, Sentra Phala Martha merupakan salah satu sentra rehabilitasi sosial yang aktif mengembangkan model pendidikan sosial terintegrasi, sehingga relevan untuk dijadikan lokasi penelitian.

Subjek penelitian meliputi berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan sosial di Sekolah Rakyat Phala Martha. Subjek tersebut terdiri atas pengelola program, pendidik atau fasilitator pendidikan sosial, serta peserta didik Sekolah Rakyat. Pengelola program dipilih sebagai informan kunci karena memiliki pemahaman mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan sosial. Pendidik atau fasilitator dipilih untuk menggali praktik pembelajaran, pendekatan pedagogis, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pendidikan. Sementara itu, peserta didik dipilih untuk memahami pengalaman belajar, perubahan sikap, serta dampak program terhadap kehidupan mereka. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman, dan relevansi informan terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan yang sistematis, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengemukakan pandangan dan pengalaman secara bebas. Wawancara dilakukan kepada pengelola program, pendidik sosial, dan peserta didik dengan fokus pada pemahaman mereka terhadap kebijakan pendidikan sosial, proses pelaksanaan program, serta dampak yang dirasakan. Observasi lapangan dilakukan untuk

mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran, interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta suasana lingkungan pendidikan sosial di Sentra Phala Martha. Observasi ini membantu peneliti memperoleh data faktual yang melengkapi hasil wawancara.

Selain wawancara dan observasi, dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung. Dokumentasi meliputi dokumen kebijakan, laporan kegiatan, kurikulum pendidikan sosial, modul pembelajaran, serta arsip foto dan catatan kegiatan yang relevan dengan penelitian. Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi, sekaligus memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara kebijakan tertulis dan praktik implementasi di lapangan. Dengan mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data, penelitian ini berupaya memperoleh data yang komprehensif dan mendalam.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang relevan dengan fokus penelitian dipertahankan, sementara data yang tidak berkaitan disisihkan. Tahap ini berlangsung secara terus-menerus selama proses pengumpulan data.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu proses mengorganisasi data ke dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau kategori tematik agar mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data membantu peneliti melihat pola, hubungan, dan kecenderungan dalam implementasi kebijakan pendidikan sosial di Sekolah Rakyat Phala Martha. Melalui penyajian data yang sistematis, peneliti dapat melakukan interpretasi secara lebih terarah dan mendalam. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan makna temuan penelitian berdasarkan pola dan hubungan yang telah diidentifikasi, serta melakukan pengecekan ulang terhadap data untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan teknik triangulasi dan kriteria kepercayaan penelitian kualitatif. Triangulasi dilakukan baik pada sumber maupun teknik pengumpulan data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengelola program, pendidik, dan peserta didik, serta

membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini menerapkan kriteria kredibilitas untuk memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan realitas yang sebenarnya, transferabilitas untuk memberikan gambaran konteks penelitian secara rinci agar dapat dipahami dan dibandingkan dengan konteks lain, dependabilitas untuk menjamin konsistensi proses penelitian, serta konfirmabilitas untuk memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data dan bukan pada bias peneliti.

Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan sosial Kementerian Sosial di Sekolah Rakyat Phala Martha. Metode penelitian ini dirancang agar selaras dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis proses implementasi kebijakan, model pendidikan sosial yang diterapkan, serta dampak sosial yang dihasilkan bagi masyarakat rentan di Kabupaten Sukabumi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat Phala Martha merupakan salah satu unit pelaksana program pendidikan sosial yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan beroperasi di lingkungan Sentra Phala Martha Kemensos yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Keberadaan Sekolah Rakyat ini berangkat dari kebutuhan untuk memberikan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang termarginalkan dan selama ini sulit dijangkau oleh sistem pendidikan formal, seperti anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, serta individu dengan latar belakang sosial yang rentan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial.

Secara historis, Sentra Phala Martha pada awalnya berfungsi sebagai Balai Rehabilitasi Sosial yang berfokus pada pemulihan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Seiring dengan dinamika kebijakan sosial nasional dan perluasan mandat Kementerian Sosial, lembaga ini kemudian berkembang menjadi Sentra Rehabilitasi Sosial dengan cakupan layanan yang lebih luas, termasuk pendidikan sosial dan pemberdayaan berbasis masyarakat. Transformasi kelembagaan ini melahirkan konsep Sekolah Rakyat Phala Martha sebagai inovasi pendidikan sosial yang memadukan aspek pendidikan, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi sosial dalam satu sistem pembelajaran yang bersifat humanis dan inklusif.

Visi Sekolah Rakyat Phala Martha, yaitu “mewujudkan masyarakat rentan yang berdaya, mandiri, dan berkepribadian sosial”, tercermin secara nyata dalam orientasi program yang tidak hanya menekankan peningkatan pengetahuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan kemampuan hidup mandiri. Misi program yang mencakup penyelenggaraan pendidikan sosial berbasis rehabilitasi dan pemberdayaan, pengembangan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal, peningkatan empati sosial, serta penguatan kerja sama lintas lembaga menunjukkan bahwa pendidikan sosial dipahami sebagai proses transformasi sosial yang komprehensif.



**Gambar 1.** Diagram Implementasi Kebijakan Pendidikan Sosial di Sekolah Rakyat Phala Martha Kabupaten Sukabumi

Implementasi kebijakan pendidikan sosial di Sekolah Rakyat Phala Martha mencerminkan pelaksanaan konkret Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya integrasi antara pendidikan, keterampilan, dan layanan sosial sebagai satu kesatuan intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran di Sekolah Rakyat Phala Martha diselenggarakan dalam bentuk pendidikan nonformal dengan orientasi pada tiga aspek utama, yaitu pengembangan keterampilan kerja, pendampingan psikososial, dan pendidikan karakter.

**Tabel 1.** Hasil Penelitian Implementasi Pendidikan Sosial Berbasis Rehabilitasi di Sekolah Rakyat Phala Martha

No	Aspek Implementasi	Indikator	Temuan Penelitian	Implikasi Sosial Dan Pendidikan
1	Dasar Kebijakan	Regulasi yang menjadi acuan program	Program Sekolah Rakyat Phala Martha dilaksanakan berdasarkan Permensos No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial	Kebijakan memberikan legitimasi hukum bagi pendidikan sosial sebagai bagian dari layanan kesejahteraan sosial
2	Kelembagaan	Struktur dan fungsi lembaga	Sekolah Rakyat berada di bawah Sentra Phala Martha Kemensos yang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi sosial dan pendidikan nonformal	Integrasi pendidikan dan rehabilitasi memperkuat pendekatan holistik terhadap kelompok rentan
3	Lokasi Program	Wilayah pelaksanaan	Program dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi yang memiliki tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah relatif tinggi	Program menjawab kebutuhan lokal dan konteks sosial masyarakat setempat
4	Sasaran Program	Karakteristik peserta didik	Sasaran utama adalah anak putus sekolah, keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan individu dengan kerentanan sosial	Pendidikan sosial menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan inklusif
5	Bentuk Pendidikan	Jenis dan sistem pendidikan	Pendidikan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan nonformal berbasis rehabilitasi dan pemberdayaan	Model ini fleksibel dan adaptif terhadap kondisi peserta didik
6	Model Pembelajaran	Pendekatan pembelajaran	Pembelajaran berbasis praktik (experiential learning) dan kontekstual sesuai kebutuhan lokal	Meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kesiapan kerja peserta didik
7	Pengembangan Keterampilan	Jenis keterampilan kerja	Pelatihan menjahit, tata boga, pertanian urban, servis peralatan rumah tangga, dan desain sederhana	Peserta didik memperoleh keterampilan produktif untuk bekerja atau berwirausaha
8	Pendampingan Psikososial	Layanan konseling	Konseling sosial dan	Pemulihan kepercayaan
				psikososial dilakukan secara rutin oleh pendamping sosial
9	Pendidikan Karakter	Nilai dan aktivitas pembinaan	Penanaman nilai Pancasila melalui upacara bendera, kepemimpinan sosial, dan kegiatan kemasyarakatan	Terbentuknya sikap nasionalisme, kedisiplinan, dan empati sosial
10	Partisipasi Peserta	Keterlibatan dalam program	Peserta didik aktif mengikuti pelatihan, kegiatan sosial, dan pembinaan karakter	Meningkatkan rasa memiliki dan motivasi belajar
11	Kolaborasi Lintas Sektor	Keterlibatan pemangku kepentingan	Kerja sama antara Kemensos, Dinas Sosial, pemerintah daerah, masyarakat, dan Pusdiklatbangpro Kesos	Memperkuat pendekatan community-based education
12	Dukungan Masyarakat	Peran lingkungan sekitar	Masyarakat terlibat dalam pelatihan, magang, dan penyediaan fasilitas	Meningkatkan keberlanjutan program dan penerimaan sosial
13	Dampak Individu	Perubahan pada peserta didik	Terjadi peningkatan keterampilan, kepercayaan diri, dan kemandirian ekonomi	Pendidikan sosial berkontribusi pada penguatan ekonomi mikro
14	Dampak Psikososial	Perubahan sikap dan perilaku	Peserta didik menunjukkan peningkatan motivasi hidup dan partisipasi sosial	Terjadi pemulihan martabat dan integrasi sosial
15	Dampak Sosial	Pengaruh terhadap masyarakat	Sekolah Rakyat menjadi pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Memperkuat solidaritas dan budaya gotong royong
16	Tantangan SDM	Ketersediaan tenaga pendidik	Keterbatasan pendidik sosial dengan kompetensi pedagogis dan rehabilitatif	Diperlukan peningkatan kapasitas dan rekrutmen SDM
17	Tantangan Pendanaan	Ketersediaan anggaran	Pendanaan program masih terbatas dan fluktuatif	Perlu diversifikasi sumber pendanaan dan dukungan lintas sektor
18	Tantangan Persepsi	Pemahaman masyarakat	Sebagian masyarakat masih memandang pendidikan nonformal kurang bernilai	Diperlukan edukasi sosial tentang pentingnya pendidikan alternatif
19	Monitoring dan Evaluasi	Sistem pengawasan	Monitoring dan evaluasi belum	Perlu penguatan

	program	sepenuhnya berbasis dampak sosial	evaluasi berkelanjutan
20	Rekomendasi Pengembangan Arah kebijakan ke depan	Penguatan sinergi, inovasi kurikulum, dan evaluasi berbasis dampak	Program berpotensi direplikasi secara nasional

Pada aspek pengembangan keterampilan kerja, Sekolah Rakyat Phala Martha menyelenggarakan berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal, seperti menjahit, tata boga, pertanian urban, servis peralatan rumah tangga, serta keterampilan desain sederhana. Pelatihan ini dirancang agar peserta didik memiliki kompetensi praktis yang dapat langsung dimanfaatkan untuk bekerja atau berwirausaha setelah menyelesaikan program. Hasil observasi menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis praktik memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan meningkatkan kesiapan kerja peserta didik.

Aspek kedua yang menjadi ciri khas pendidikan sosial di Phala Martha adalah layanan konseling sosial dan psikososial. Pendampingan ini diberikan secara rutin untuk membantu peserta didik mengatasi hambatan mental dan emosional yang berasal dari pengalaman hidup yang sulit, seperti kemiskinan, kekerasan, penelantaran, maupun diskriminasi sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konseling psikososial berperan penting dalam memulihkan rasa percaya diri, membangun motivasi belajar, serta menumbuhkan kembali harapan hidup peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai proses pemulihan martabat manusia.

Aspek ketiga adalah pendidikan karakter dan penguatan kesadaran sosial. Pendidikan karakter di Sekolah Rakyat Phala Martha diterapkan melalui pembinaan nilai-nilai Pancasila, kegiatan upacara bendera, pelatihan kepemimpinan sosial, serta keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan upacara bendera, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai rutinitas seremonial, tetapi dimaknai sebagai sarana pembinaan kedisiplinan, tanggung jawab, dan nasionalisme. Melalui kegiatan ini, peserta didik dilatih untuk memahami identitas kebangsaan dan peran sosialnya sebagai bagian dari masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan sosial di Sekolah Rakyat Phala Martha tidak dilakukan secara terpisah dari lingkungan sosialnya, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerja sama antara

Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi berperan dalam koordinasi program dan dukungan administratif, sementara masyarakat terlibat dalam kegiatan pelatihan, magang, serta penyediaan dukungan fasilitas. Selain itu, lembaga ini juga bekerja sama dengan Pusdiklatbangprof Kesos dalam pengembangan kurikulum dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik sosial. Kolaborasi ini memperkuat pendekatan *community-based education* yang menjadi karakter utama pendidikan sosial di Phala Martha.

Dari sisi efektivitas program, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan sosial yang dijalankan oleh Sekolah Rakyat Phala Martha memberikan dampak positif secara individu maupun sosial. Peserta didik mengalami peningkatan kapasitas keterampilan, kepercayaan diri, dan kemandirian ekonomi. Beberapa lulusan program pelatihan keterampilan dilaporkan mampu membuka usaha mandiri seperti konveksi rumahan, bengkel kecil, dan usaha kuliner sederhana yang turut meningkatkan pendapatan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan sosial berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi mikro masyarakat rentan.

Dampak psikososial juga terlihat signifikan. Peserta didik yang sebelumnya mengalami rasa rendah diri dan keterasingan sosial menunjukkan perubahan sikap yang positif, seperti meningkatnya partisipasi dalam kegiatan sosial dan munculnya aspirasi untuk berkontribusi sebagai pendamping sosial bagi kelompok lain. Secara sosial, keberadaan Sekolah Rakyat Phala Martha berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat. Melalui kegiatan bakti lingkungan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan masyarakat, lembaga ini berkontribusi dalam menumbuhkan budaya gotong royong dan kepedulian sosial di lingkungan sekitar.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi program. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama, terutama kurangnya tenaga pendidik sosial yang memiliki kompetensi pedagogis sekaligus pemahaman rehabilitatif. Selain itu, keterbatasan pendanaan operasional memengaruhi ketersediaan fasilitas pembelajaran dan alat praktik. Tantangan lainnya adalah masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap konsep pendidikan sosial, yang sering kali dipersepsikan



sebagai pendidikan nonformal yang kurang bernilai dibandingkan pendidikan formal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi lintas lembaga antara Kementerian Sosial, kementerian terkait, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keberlanjutan program. Inovasi kurikulum sosial yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi kreatif juga perlu dikembangkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang berfokus pada dampak sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa pendidikan sosial benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Dengan penguatan tersebut, Sekolah Rakyat Phala Martha berpotensi menjadi model pendidikan rehabilitatif nasional yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diimplementasikan melalui Sekolah Rakyat Phala Martha di Kabupaten Sukabumi memiliki peran strategis dalam upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial masyarakat rentan. Sekolah Rakyat Phala Martha hadir sebagai bentuk nyata intervensi kebijakan publik yang dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini berada di luar jangkauan sistem pendidikan formal, seperti anak putus sekolah, keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan individu dengan hambatan sosial lainnya. Melalui pendekatan pendidikan nonformal berbasis rehabilitasi sosial, program ini mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang bersifat kontekstual, humanis, dan berorientasi pada pemulihan fungsi sosial peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pendidikan sosial yang diterapkan di Sekolah Rakyat Phala Martha bersifat inklusif dan partisipatif, dengan mengintegrasikan pendidikan keterampilan kerja, pendampingan psikososial, serta pembinaan karakter dan kesadaran sosial. Integrasi ketiga aspek tersebut menjadi kekuatan utama program, karena pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses peningkatan kemampuan kognitif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kepribadian, penguatan nilai sosial, dan peningkatan kemandirian hidup. Peserta didik tidak diposisikan sebagai objek bantuan,

melainkan sebagai subjek pembelajaran yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan sosial.

Dari sisi dampak, program pendidikan sosial di Sekolah Rakyat Phala Martha terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas peserta didik, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Pelatihan keterampilan kerja memberikan bekal praktis yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau berwirausaha, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga. Sementara itu, pendampingan psikososial dan pendidikan karakter berperan penting dalam memulihkan rasa harga diri, membangun motivasi hidup, serta menumbuhkan kesadaran sosial dan empati terhadap lingkungan sekitar. Dampak sosial program juga terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan kemasyarakatan dan menguatnya solidaritas sosial di lingkungan sekitar Sentra Phala Martha.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan sosial. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik sosial yang memiliki kompetensi pedagogis dan rehabilitatif secara bersamaan, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Selain itu, keterbatasan pendanaan operasional berdampak pada penyediaan fasilitas pembelajaran dan sarana pendukung kegiatan keterampilan. Tantangan lainnya adalah masih adanya persepsi sebagian masyarakat yang memandang pendidikan sosial sebagai pendidikan nonformal yang kurang bernilai dibandingkan pendidikan formal, sehingga memerlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pendidikan sosial. Sinergi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu terus dikembangkan agar program pendidikan sosial dapat berjalan secara terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, diperlukan inovasi kurikulum sosial yang fleksibel dan relevan dengan perkembangan dunia kerja dan ekonomi kreatif, sehingga lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan yang diakui dan berdaya saing.



Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat Phala Martha memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai model pendidikan rehabilitatif nasional yang dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, pendanaan yang memadai, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, pendidikan sosial dapat menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan sosial di Indonesia serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pendidikan sebagai bagian integral dari rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat rentan.

## B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Kebijakan Pendidikan Sosial Kementerian Sosial di Kabupaten Sukabumi Studi Kasus Sekolah Rakyat Phala Martha.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, James E. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin Company, 2003.
- Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029*. Jakarta: Bappenas, 2025.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage, 2014.
- Dewey, John. *Democracy and Education*. New York: The Free Press, 1966.
- Djamil, Mustofa. *Pendidikan Nonformal dalam Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New York: Pearson Education, 2018.
- Freire, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Hidayat, Rahmat. *Pendidikan Inklusif dan Kebijakan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ife, Jim. *Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Karsidi, Ravik. "Model Pemberdayaan Sosial Berbasis Pendidikan Nonformal." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No. 2 (2019): 145-162.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES, 1996.
- Kementerian Sosial RI. *Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2024*. Jakarta: Kemensos RI, 2025.
- Kementerian Sosial RI. *Profil Sentra Phala Martha Sukabumi*. Sukabumi: Kemensos RI, 2024.
- Midgley, James. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage, 1995.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nurdin, Ahmad. *Pendidikan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Payne, Malcolm. *Modern Social Work Theory*. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Pusdiklatbangprof Kesos). *Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Kemensos, 2024.
- Santoso, Bambang. "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Sosial pada Lembaga Rehabilitasi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 5, No. 2 (2023): 133-149.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran dan Kajian*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Sulaeman, Ahmad. "Kebijakan Pendidikan Sosial dalam Perspektif Rehabilitasi." *Jurnal Sosio Humaniora*, Vol. 10, No. 1 (2021): 45–58.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak dan Remaja*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tilaar, H.A.R. *Manifesto Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- UNESCO. *Education for All Global Monitoring Report*. Paris: UNESCO, 2015.
- Wibowo, Eko. "Implementasi Program Sekolah Rakyat dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 7, No. 3 (2022): 201–215.
- Yuliani, Nita. "Pendidikan Sosial sebagai Strategi Rehabilitasi dan Inklusi Sosial." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Sosial*, Vol. 9, No. 1 (2024): 50–67.